

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT



<http://sumbar.bps.go.id>

# 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT**



# **2014**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2014

Nomor ISBN : 978-602-1196-61-8  
Nomor Publikasi : 13520.15.04  
Katalog BPS : 4101002.13  
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xiv+ 73

## **Naskah :**

Bidang Statistik Sosial

## **Gambar Kulit :**

Kehumasan BPS Provinsi Sumatera Barat

## **Diterbitkan Oleh :**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini  
untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat  
Statistik Provinsi Sumatera Barat***

---

## KATA PENGANTAR

Pengukuran kesejahteraan penduduk menjadi perhatian berbagai pihak baik kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Banyak tujuan berada dibalik usaha melakukan pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk. Berbagai tujuan tersebut diantaranya adalah fungsi monitoring proses dan penilaian keberhasilan pembangunan. Selain itu informasi mengenai kesejahteraan penduduk juga sangat penting bagi perencanaan khususnya untuk penetapan sasaran atau target pembangunan.

Dalam Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2014 ditampilkan beberapa aspek yang menggambarkan tingkat kesejahteraan seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran, kemiskinan, perumahan dan beberapa aspek sosial lainnya. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013-2014 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013-2014.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat, sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas data, saran yang konstruktif dari pengguna data merupakan input yang berharga. Akhirnya diucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang telah berperan dalam penerbitan publikasi ini.

Padang, Oktober 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Barat



**YOMIN TOFRI, MA**



---

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	xi
Bab I Kependudukan .....	1
Bab II Kesehatan dan Gizi .....	7
Bab III Pendidikan .....	17
Bab IV Ketenagakerjaan .....	25
Bab V Taraf dan Pola Konsumsi .....	35
Bab VI Perumahan dan Lingkungan .....	47
Bab VII Kemiskinan .....	55
Bab VIII Sosial Lainnya .....	67

---

<http://sumbar.bps.go.id>

---

## DAFTAR TABEL

Halaman

### Bab I Kependudukan

Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	2
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	4
Tabel 1.3	Persentase Wanita yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia Kurang Dari 16 Tahun di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	4
Tabel 1.4	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	6

### Bab II Kesehatan Dan Gizi

Tabel 2.1	Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	7
Tabel 2.2	Rata-Rata Lamanya Balita Mendapatkan ASI (bulan) Menurut Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	9
Tabel 2.3	Tingkat Imunisasi Campak di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	10
Tabel 2.4	Persentase Balita Menurut Penolong Waktu Melahirkan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	11
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	13
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	14
Tabel 2.7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Daerah dan Tempat Berobat di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	15

### Bab III Pendidikan

Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	19
-----------	--	----

---

Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	20
Tabel 3.3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Umur 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	22
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	23

#### **Bab IV Ketenagakerjaan**

Tabel 4.1	TPAK dan TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	27
Tabel 4.2	TPAK dan TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	28
Tabel 4.3	Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	29
Table 4.4	Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	30
Table 4.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	32
Table 4.6	Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	33

#### **Bab V Taraf Dan Pola Konsumsi**

Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	36
Tabel 5.2	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	38
Tabel 5.3	Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	39

---

Tabel 5.4 Rata-Rata Pengeluaran untuk Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014.....	41
Tabel 5.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk Perkapita dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	42
Tabel 5.6 Jumlah Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein Per Jenis Komoditi di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	46

## **Bab VI Perumahan Dan Lingkungan**

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Tempat Tinggal Tahun 2014 .....	49
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	51
Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Rumah Tangga Kumuh dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	52
Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2014.....	54

## **Bab VII Kemiskinan**

Tabel 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	56
Tabel 7.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2013-2014 .....	58
Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Variabel Perumahan Tahun 2014 .....	61
Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Aset di Sumatera Barat Tahun 2014.....	62
Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Akses Pada Pelayanan Kesehatan Gratis Serta Raskin di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	65

---

## Bab VIII Sosial Lainnya

Tabel 8.1	Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Melakukan Perjalanan dalam Kurun Waktu 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuannya Tahun 2014 ..	69
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga di Sumatera Barat Menurut Akses Terhadap Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2014 .....	70
Tabel 8.3	Persentase Pengguna Internet Berumur 15 Tahun Ke Atas dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tempat Akses di Sumatera Barat Tahun 2014....	72

<http://sumbar.bps.go.id>

---

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

### Bab I Kependudukan

Gambar 1.1	Persentase Wanita yang Melakukan Perkawinan Pertama Di Usia Kurang Dari 16 Tahun di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	4
Gambar 1.2	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014. ....	5
Gambar 1.3	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014. ....	6

### Bab II Kesehatan Dan Gizi

Gambar 2.1	Persentase Angka Kesakitan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	7
Gambar 2.2	Rata-Rata Lamanya Balita Mendapatkan ASI (bulan) Menurut Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	9
Gambar 2.3	Tingkat Imunisasi Campak di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	10
Gambar 2.4	Persentase Balita Menurut Penolong Waktu Melahirkan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	11
Gambar 2.5	Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Terlatih di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	12
Gambar 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	14
Gambar 2.7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 .....	15

### III Pendidikan

Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	19
Gambar 3.2	Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014....	20

---

Gambar 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014.....	22
--	----

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	23
---	----

#### **IV Ketenagakerjaan**

Gambar 4.1 TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	27
Gambar 4.2 TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014.....	28
Gambar 4.3 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	29
Gambar 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	32
Gambar 4.5 Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	33

#### **V Taraf dan Pola Konsumsi**

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Menurut Komoditi Makanan dan Non Makanan Dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014.....	37
Gambar 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014.....	39
Gambar 5.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2013-2014.....	41

#### **VI Perumahan dan Lingkungan**

Gambar 6.1 Rata-Rata Luas Lantai Perkapita (m <sup>2</sup> ) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014.....	49
---	----

---

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	51
Gambar 6.3 Persentase Rumah Berdasarkan Status Kepemilikannya di Sumatera Barat Tahun 2014 .....	53

## **VII Kemiskinan**

Gambar 7.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2013-2014 .....	58
Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Kredit Tahun 2014 .....	66

## **VIII Sosial Lainnya**

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Melakukan Perjalanan Tahun 2014 .....	67
Gambar 8.2 Persentase Penduduk Berumur Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Tipe Tempat Tinggal Tahun 2014 .....	71
Gambar 8.3 Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Mengalami Tindak Kriminalitas Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2014 .....	73



---

# 1 KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan, karena penduduklah yang nantinya akan mengelola sumber daya alam yang ada. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan aset yang sangat berharga atau malah merupakan beban dalam pembangunan jika memiliki kemampuan yang rendah. Oleh sebab itu, dalam menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang juga harus mendapat prioritas utama untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

## Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

*Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2014 adalah 5,132 juta jiwa, naik sekitar 1,29 persen dari tahun 2013.*

Dari hasil penghitungan proyeksi penduduk menunjukkan, jumlah penduduk Sumatera Barat untuk tahun 2013 adalah 5,1 juta jiwa. Angka ini naik sekitar 1,29 persen di tahun 2014, dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk Sumatera Barat adalah 5,132 juta jiwa. Semakin besarnya jumlah penduduk, Sumatera Barat dihadapkan pada masalah kependudukan yang

---

cukup serius. Oleh sebab itu, upaya penurunan jumlah penduduk disertai peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan program pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tabel 1.1  
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
2013	5,066	1,29
2014	5,1312	

Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat dari tahun 2013 ke 2014 adalah 1,29 persen per tahun

Sumber: Proyeksi Penduduk 2013-2014

Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat tahun 2014 mencapai rata-rata 1,29 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, secara langsung akan menambah jumlah penduduk usia muda dan akan menimbulkan permasalahan baru.

## Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah angka ketergantungan atau beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Jadi semakin sedikit jumlah usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke

---

atas) akan mengurangi angka beban tanggungan, yang mengindikasikan bahwa akan semakin banyak kesempatan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri.

*Angka Beban  
Ketergantungan  
Sumatera Barat  
turun dari 56,31  
tahun 2013  
menjadi 55,91  
tahun 2014.*

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2013, angka beban ketergantungan Sumatera Barat adalah 56,31 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 56 penduduk usia non produktif. Angka ini tidak berbeda di tahun 2014, dimana angka beban ketergantungan menjadi 55,91 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 56 penduduk usia non produktif. Meskipun angka beban ketergantungan ini ada penurunan tetapi nilainya masih di atas 50.

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa baik persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) dan persentase penduduk usia tua (65 tahun ke atas) mengalami penurunan. Dari tabel 1.2 juga terlihat bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya (dari 63,98 % pada tahun 2013 menjadi 64,14% pada tahun 2014).

Tabel 1.2  
Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban  
Ketergantungan di Sumatera Barat  
Tahun 2013-2014

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	30,61	63,98	5,41	56,31
2014	30,44	64,14	5,42	55,91

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2035

## Fertilitas

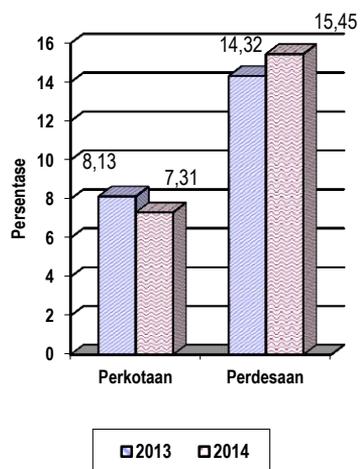
Salah satu cara untuk mengurangi angka fertilitas/kelahiran adalah dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) serta penundaan usia perkawinan pertama.

Tabel 1.3 Persentase Wanita yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia Kurang dari 16 Tahun di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	8,36	14,32	12,11
2014	7,31	15,45	12,41

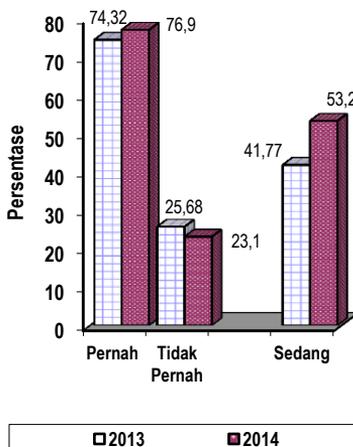
Sumber: Susenas 2013-2014

Gambar 1.1  
Persentase Wanita Yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia Kurang dari 16 Tahun di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



*Penurunan persentase wanita kawin dibawah usia 16 tahun diharapkan dapat memperpendek rentang masa subur dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak*

Gambar 1.2. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Dari tabel 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi sedikit kenaikan persentase wanita kawin di usia kurang dari 16 tahun dari 12,11 persen pada tahun 2013 menjadi 12,41 persen pada tahun 2014. Kenaikan terjadi di daerah perdesaan yaitu dari 14,32 persen pada tahun 2013 menjadi 15,45 persen pada tahun 2014. Sementara untuk daerah perkotaan, persentase wanita kawin usia kurang dari 16 tahun pada tahun 2013 adalah 8,36 persen, turun menjadi 7,31 persen pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan mulai adanya kesadaran wanita usia 16 tahun ke bawah di daerah perkotaan mengenai pentingnya untuk menunda usia perkawinan. Hal yang menjadi perhatian bahwa wanita pada kelompok usia yang sama di daerah perdesaan karena dengan tidak melihat status perkawinannya, ada indikasi wanita pada kelompok usia muda tersebut telah melakukan hubungan seksual.

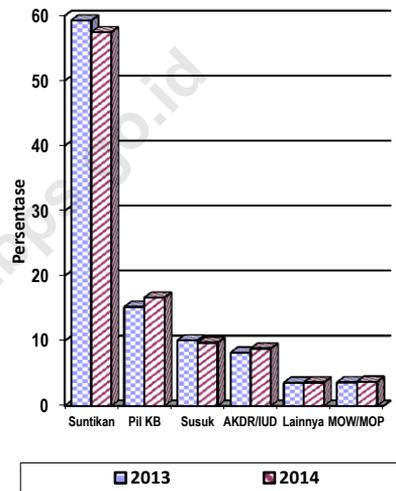
Pemakaian alat kontrasepsi KB juga diharapkan akan menekan laju pertumbuhan penduduk. Tahun 2013 persentase wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dan pernah memakai alat/cara KB ada 74,32 persen dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 76,90 persen. Jika dilihat dari wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang memakai alat/cara KB pada tahun 2013 sebesar 41,77 persen

dan di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 53,20 persen.

Tabel 1.4  
 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut  
 Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Sumatera  
 Barat Tahun 2013-2014

Alat/cara KB yang sedang digunakan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
MOW/MOP	3,62	3,72
AKDR/IUD	8,20	8,83
Suntikan	59,27	57,47
Susuk	10,09	9,72
Pil KB	15,23	16,65
Lainnya	3,59	3,61

Gambar 1.3. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Sumber: Susenas 2013-2014

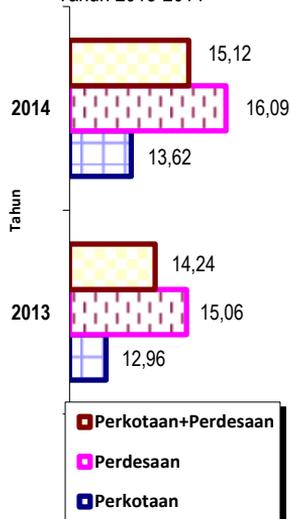
Bila dilihat hasil Susenas 2013 dan 2014 sebagaimana disajikan Tabel 1.4 bahwa alat KB suntik masih mendominasi alat/cara KB yang digunakan masyarakat. Tertinggi berikutnya yaitu menggunakan pil KB yaitu sebesar 15,23 persen pada tahun 2013 dan 16,65 persen tahun 2014. Diurutan berikutnya Susuk KB/norplan/implanon/alwalit, pada tahun 2013 sebesar 10,09 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi 9,72 persen. Sementara alat/cara KB lainnya yang digunakan masyarakat kurang dari 10 persen.

## 2 KESEHATAN DAN GIZI

### Status Kesehatan Masyarakat

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya jika memiliki fisik yang sehat. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Gambar 2.1.  
Persentase Angka Kesakitan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 2.1  
Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Indikator Kesehatan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Kesakitan (%)	12,96	13,62	15,06	16,09	14,24	15,12
Lama Sakit (hari)	5,48	5,44	6,06	6,07	5,86	5,85

Sumber: Susenas 2013-2014

---

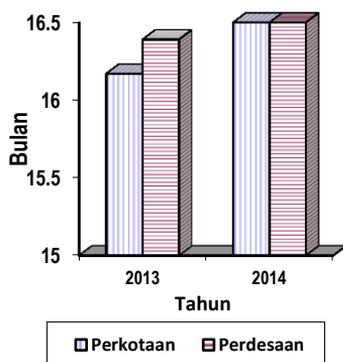
Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa angka kesakitan dan lamanya sakit untuk daerah perdesaan masih tinggi dibanding daerah perkotaan. Jika dibandingkan antar kedua tahun, terlihat adanya kenaikan dan penurunan angka kesakitan dan lama sakit penduduk. Secara umum angka kesakitan pada tahun 2013 adalah 14,24 persen, naik menjadi 15,12 persen pada tahun 2014. Lama sakit secara total untuk daerah Sumatera Barat adalah 5,86 hari di tahun 2013 dan relatif sama di tahun 2014, yaitu 5,85 hari.

## Pemberian ASI

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi karena komposisi ASI yang mengandung nilai gizi yang tinggi serta ASI dapat meningkatkan kekebalan tubuh Balita terhadap penyakit. Oleh karena itu semakin lama bayi disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2013 ada 97,54 persen Balita pernah disusui, dan angka ini mengalami penurunan menjadi 97,13 persen pada tahun 2014. Jika dilihat dari lamanya disusui (pada Tabel 2.2) terlihat adanya kenaikan rata-rata Balita disusui yaitu dari 16,31 bulan menjadi 16,67 bulan tahun 2014.

*Komposisi ASI yang sangat kompleks adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung nilai gizi serta zat kekebalan tubuh yang sangat bagus.*

Gambar 2.2. Rata-Rata Lamanya Balita Mendapat ASI (bulan) Menurut Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 2.2  
Rata-Rata Lamanya Balita Mendapat ASI (bulan) Menurut Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Daerah Tempat Tinggal (1)	Rata-rata Lama Disusui (bulan)	
	2013 (2)	2014 (3)
Perkotaan	16,17	16,53
Perdesaan	16,39	16,75
Perkotaan + Perdesaan	16,31	16,67

Sumber: Susenas 2013-2014

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, terlihat rata-rata lama Balita disusui di daerah perdesaan lebih lama daripada daerah perkotaan. Di daerah perdesaan tahun 2013, rata-rata Balita disusui selama 16,39 bulan sedangkan untuk daerah perkotaan selama 16,17 bulan. Begitu juga pada tahun 2014, kedua daerah mengalami kenaikan tetapi rata-rata lama Balita disusui untuk daerah perdesaan masih lebih tinggi daripada daerah perkotaan yaitu 16,53 bulan untuk daerah perkotaan dan 16,75 bulan untuk daerah perdesaan.

### Mengurangi Kematian Anak

Tujuan nomor empat pada *Milennium Development Goals* (MDGs) adalah mengurangi

kematian anak. Salah satu indikator menurunkan angka kematian anak dilihat dari proporsi anak usia satu tahun (12 bulan) dan usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi campak

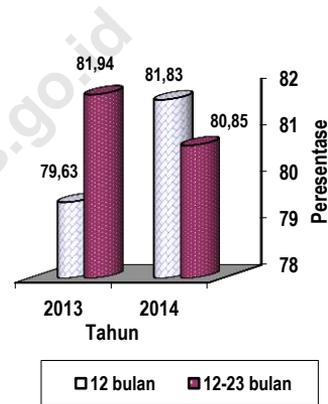
Tabel 2.3  
Tingkat Imunisasi Campak di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Usia (Bulan)	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
12	79,63	81,83
12-23	81,94	80,85

Sumber : Susenas 2013-2014

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa tingkat pemberian imunisasi campak anak usia 12 bulan adalah 79,63 persen pada tahun 2013, sedangkan untuk anak usia 12-23 bulan sebesar 81,94 persen. Terjadi peningkatan pada tahun 2014 untuk tingkat imunisasi anak usia 12 bulan, yaitu 81,83 persen, namun terjadi sedikit penurunan untuk tingkat imunisasi campak pada anak usia 12-23 bulan tahun 2014 yaitu sebesar 80,85 persen.

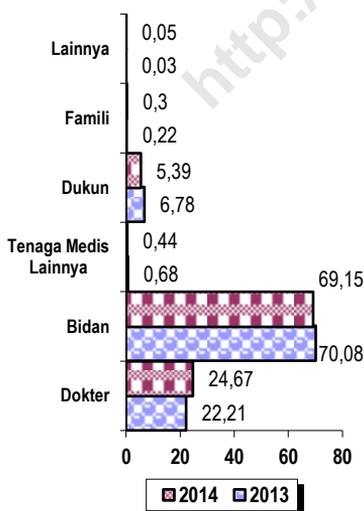
Gambar 2.3. Tingkat Imunisasi Campak di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



## Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana mutlak diperlukan namun yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan tenaga penolong persalinan bayi yang memadai. Hal ini berkaitan dengan penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan, pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar pelayanan tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah.

Gambar 2.4. Persentase Balita Menurut Penolong Waktu Melahirkan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 2.4

Persentase Balita Menurut Penolong Waktu Melahirkan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Penolong Waktu Melahirkan	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Dokter	22,21	24,67
Bidan	70,08	69,15
Tenaga Medis Lainnya	0,68	0,44
Dukun bersalin	6,78	5,39
Famili	0,22	0,30
Lainnya	0,03	0,05

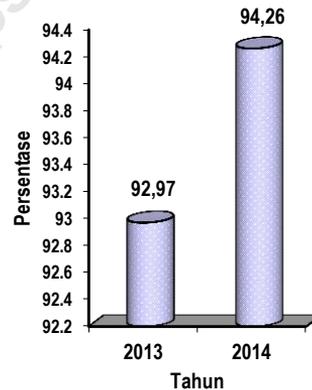
Sumber: Susenas 2013-2014

Selama periode 2013-2014 terdapat sekitar 70 persen Balita di Sumatera Barat yang proses kelahirannya ditolong oleh bidan. Sekitar 20 hingga 25 persen ditolong oleh dokter. Dari Tabel 2.4 masih ada Balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun, angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun (6,78 % tahun 2013 menjadi 5,39 % pada tahun 2014).

Sejalan dengan salah satu tujuan MDGs adalah meningkatkan kesehatan ibu, salah satu indikator untuk meningkatkan kesehatan ibu yaitu dengan melihat proporsi proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Dari hasil Susenas 2013-2014, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga terlatih dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 1,29 persen yaitu dari 92,97 persen naik menjadi 94,26 persen.

Selain tenaga penolong kelahiran bayi, Susenas juga menyajikan data tentang upaya pengobatan yang

Gambar 2.5. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Terlatih di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



dilakukan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan. Persentase untuk berobat sendiri tahun 2013 di Sumatera Barat ada 53,20 persen, angka ini turun menjadi 52,40 persen di tahun 2014. Untuk daerah perkotaan, penduduk yang berobat sendiri sekitar 53,73 persen pada tahun 2013 dan 49,55 persen pada tahun 2014. Untuk daerah perdesaan berturut-turut tahun 2013 dan 2014 adalah 52,86 persen dan 54,27 persen.

Tabel 2.5

Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Daerah Tempat Tinggal	Persentase penduduk berobat sendiri	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>	53,73	49,55
<b>Perdesaan</b>	52,86	54,27
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	53,20	52,40

Sumber: Susenas 2013-2014

Terdapat beberapa jenis/cara pengobatan yang digunakan yaitu cara tradisional, modern atau lainnya.

Tabel 2.6

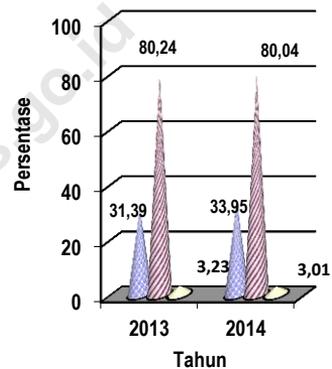
Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Jenis Pengobatan Sendiri	Persentase penduduk berobat sendiri	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Tradisional	31,39	33,95
Modern	80,24	80,04
Lainnya	3,23	3,01

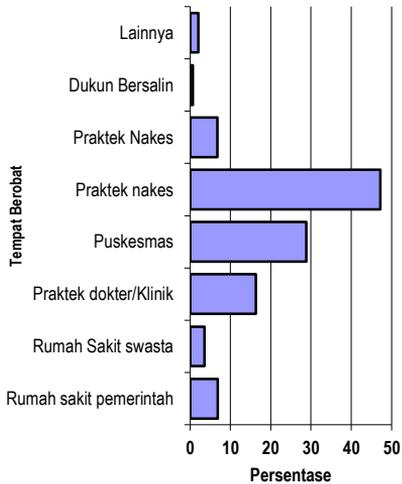
Sumber: Susenas 2013-2014

Dari Tabel 2.6 terlihat bahwa penduduk telah banyak memilih cara modern dibandingkan dengan cara tradisional dan lainnya. Disamping itu, tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Gambar 2.6. Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Gambar 2.7. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Sumatera Barat Tahun 2014



Tabel 2.7  
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Daerah dan Tempat Berobat di Sumatera Barat Tahun 2014

Tempat Berobat	Persentase penduduk berobat jalan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah sakit pemerintah	9,83	4,81	6,86
Rumah sakit swasta	6,45	1,58	3,57
Praktek dokter/poliklinik	21,17	12,97	16,32
Puskesmas/Pustu	26,66	30,28	28,80
Praktek Nakes	40,96	51,50	47,20
Praktek Batra	3,43	9,01	6,73
Dukun bersalin	0,66	0,64	0,65
Lainnya	1,87	2,10	2,01
<b>% Penduduk berobat jalan</b>	<b>58,42</b>	<b>55,23</b>	<b>56,49</b>

Sumber: Susenas 2014

Dari Tabel 2.7 terlihat bahwa persentase penduduk berobat jalan di Sumatera Barat tahun 2014 adalah 56,49 persen. Secara umum, tempat berobat yang menjadi rujukan paling banyak adalah praktek Nakes adalah 47,20 persen. Untuk daerah perkotaan tempat berobat yang paling banyak menjadi rujukan pada tahun 2014 adalah Praktek Tenaga Kesehatan (praktek Nakes) yaitu 40,96 persen. Demikian pula untuk daerah perdesaan tempat berobat yang paling

---

banyak menjadi rujukan adalah praktek Nakes yaitu 51,50 persen. Persentase penduduk perkotaan yang memanfaatkan rumah sakit pemerintah hampir dua kali lipat dari daerah perdesaan. Tahun 2014, masih ada penduduk yang memanfaatkan jasa dukun bersalin yaitu sebesar 0,65 persen.

<http://sumbar.bps.go.id>

---

## 3 PENDIDIKAN

Menurut UUD 1945 Pasal 27 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin majulah bangsa tersebut. Untuk itulah pembangunan di sektor pendidikan perlu diutamakan. Pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa sektor yang merupakan kebutuhan mendasar, karena langsung memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan

---

tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

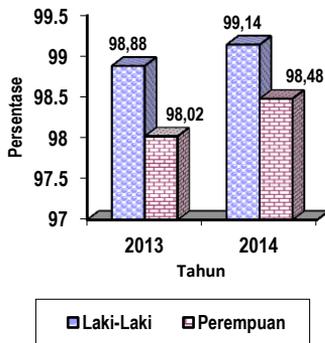
## Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf ini juga merupakan salah satu tujuan MDGs dimana nilai angka melek huruf yang menjadi standar MDGs yaitu 100 persen. Di bawah ini adalah tabel angka melek huruf di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2014.

*Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.*

Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 3.1

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	98,88	99,14
Perempuan	98,02	98,48
Laki-Laki + Perempuan	98,44	98,80

Sumber : Susenas 2013-2014

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 angka melek huruf, secara keseluruhan mengalami kenaikan. Untuk angka melek huruf laki-laki naik sebesar 0,26 persen dan perempuan naik sebesar 0,47 persen, dan total keseluruhan naik sebesar 0,37 persen. Pada tahun 2014, angka melek huruf secara total sebesar 98,80 persen.

Jika dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di Sumatera Barat yang masih dan pernah mengenyam pendidikan, masih ada sekitar 26,23 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak tamat SD. Angka ini turun sebesar 3,59 persen dari angka tahun sebelumnya. Dari hasil

Susenas 2013 terdapat, 24,44 persen yang tamat SD dan hanya 6,92 persen penduduk yang tamat Diploma I ke atas.

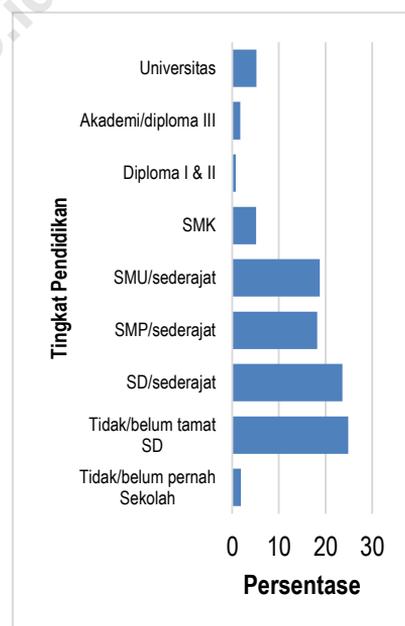
Tabel 3.2  
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014

Jenjang Pendidikan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,01	2,47	1,89
Tidak/Belum Tamat SD	17,05	29,98	24,86
Sekolah Dasar/ sederajat	18,35	27,11	23,64
Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	17,67	18,62	18,24
Sekolah Menengah Umum/ sederajat	25,85	14,08	18,75
Sekolah Menengah Kejuruan	7,29	3,72	5,13
Diploma I & II	0,76	0,46	0,58
Akademi/ Diploma III	3,27	0,73	1,74
Universitas/ D.IV	8,75	2,83	5,17
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2014

Dari tabel 3.2 terlihat juga bahwa pada tahun 2014 persentase penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah ada 68,62 persen dimana yang tidak/belum pernah sekolah dasar sebesar 1,89 persen, tidak tamat

Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Berumur 10 tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014



---

SD/ sederajat ada 24,86 persen, tamat SD dan sederajat 23,64 persen dan tamat SMP 18,24 persen. Di daerah perkotaan yang berpendidikan SMP ke bawah sekitar 54,08 persen. Untuk penduduk yang menamatkan pendidikan setara SMA di daerah perkotaan sekitar 1,8 kali lipat dibandingkan daerah perdesaan. Terlihat juga dari Tabel 3.2, tahun 2014 penduduk di daerah perdesaan yang menamatkan pendidikan sarjana ke atas masih sangat rendah yaitu sebesar 4,02 persen.

### **Rata-Rata Lama Sekolah**

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Berdasarkan data Susenas tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat adalah 8,25 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk Sumatera Barat baru mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas II SMP atau putus sekolah di kelas III SMP. Angka ini masih rendah dari program pendidikan 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

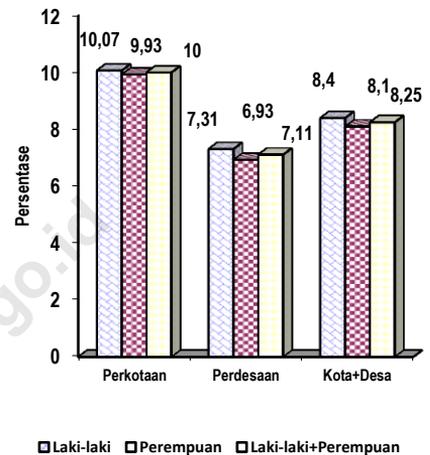
Tabel 3.3  
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk  
Umur 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan  
Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	10,07	7,31	8,40
Perempuan	9,93	6,93	8,10
Laki-laki + Perempuan	10,00	7,11	8,25

Sumber : Susenas 2014

Dari Tabel 3.3 terlihat rata-rata lama sekolah tahun 2014 untuk penduduk laki-laki berumur 25 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yaitu 8,40 tahun untuk laki-laki dan 8,10 tahun untuk perempuan. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah perdesaan masih memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari pada daerah perkotaan. Untuk daerah perkotaan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas adalah 10 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk perkotaan di Sumatera Barat mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas I SMA. Untuk daerah perdesaan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas adalah 7,11 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk perdesaan di Sumatera Barat baru

Gambar 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Umur 25 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014

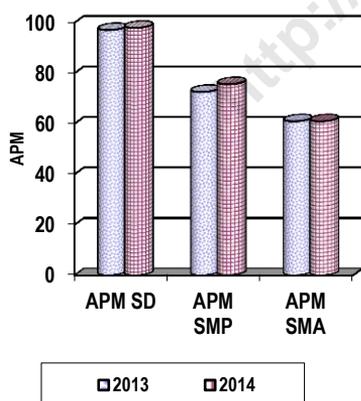


mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas I SMP atau putus sekolah di kelas II SMP.

### Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (penduduk usia 7-12 tahun), SMP (penduduk usia 13-15 tahun), dan SMA (penduduk usia 16-18 tahun). Di bawah ini adalah tabel APM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012-2013.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 3.4

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	APM SD		APM SMP		APM SMA	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	96,93	98,00	68,34	70,72	55,97	60,53
Perempuan	97,19	97,83	76,97	80,53	66,09	72,31
Laki-laki + Perempuan	97,05	97,92	72,57	75,61	60,96	66,52

Sumber : Susenas 2013-2014

Secara umum, APM selama periode 2013-2014, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas mengalami kenaikan untuk semua jenjang pendidikan. Bila dilihat

---

berdasarkan jenjang pendidikan, APM tertinggi dari tahun ke tahun adalah APM SD dengan nilai diatas 90 persen, sedangkan urutan kedua adalah APM SMP dan yang terakhir adalah APM SMA.

Untuk periode 2013-2014, nilai APM untuk jenis kelamin perempuan pada jenjang pendidikan lanjutan lebih tinggi dari laki-laki pada tahun 2014. Hanya pada jenjang pendidikan SD laki-laki lebih tinggi dari perempuan untuk tahun 2014.

Berdasarkan nilai total, APM terbesar yang mengalami kenaikan adalah APM SMA yaitu sebesar 9,12 persen. APM SMP mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen, dan APM SD mengalami peningkatan sebesar 0,90 persen.

*Nilai APM Sumatera Barat di jenjang pendidikan lanjutan masih belum mencapai target MDGs yaitu 100*

---

## 4 KETENAGAKERJAAN

*Indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan perbandingan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja dibandingkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas. TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap angkatan kerja. Sumber data yang digunakan adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPAK Sumatera Barat tahun 2014 adalah 65,19 persen dan angka ini turun dari tahun 2013 yaitu 62,92 persen. Dua tahun berturut-turut, jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan

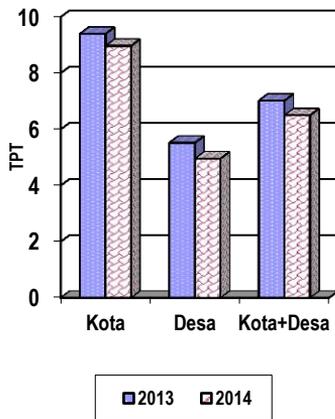
---

bahwa penduduk yang berpotensi secara ekonomis untuk melakukan pekerjaan lebih banyak di daerah perdesaan. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari TPAK perempuan sekitar 1,6 kali lipat. Untuk tahun 2013 TPAK laki-laki adalah 79,79 persen dan untuk perempuan 47,63 persen. Tahun 2014, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan, di mana TPAK laki-laki menjadi 80,25 persen sedangkan TPAK perempuan menjadi 50,65 persen.

*TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari perempuan namun berlaku kebalikannya untuk TPT*

TPT Sumatera Barat turun dari 7,02 persen pada tahun 2013 menjadi 6,50 persen tahun 2014. Ini mengindikasikan kondisi ekonomi secara makro mengalami fluktuasi yang mengakibatkan tingkat pencari kerja meningkat. Bila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, TPT di daerah perdesaan pada tahun 2013 dan 2014 lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan karena sektor potensial yang menjadi mata pencarian mayoritas penduduk Indonesia terdapat di perdesaan, sehingga pengangguran di perdesaan menjadi lebih sedikit. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin pada tahun 2013 dan 2014, TPT perempuan selalu lebih tinggi dari pada TPT laki-laki.

Gambar 4.1 TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 4.1  
TPAK dan TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Daerah/Jenis Kelamin	TPAK		TPT	
	2013*	2014	2013*	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Perkotaan</b>	60,87	62,91	9,40	8,97
<b>Perdesaan</b>	64,28	66,71	5,52	4,96
<b>Total</b>	62,92	65,19	7,02	6,50
<b>Laki-laki</b>	78,79	80,25	6,97	6,18
<b>Perempuan</b>	47,63	50,65	7,10	7,00
<b>Total</b>	62,92	65,19	7,02	6,50

Keterangan: \* Angka *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Sumber: Sakernas 2013-2014

TPAK dan TPT menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa TPAK cenderung lebih tinggi pada penduduk yang menamatkan pendidikan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan tinggi lebih berperan aktif secara ekonomi. Dari tabel tersebut juga diketahui TPT cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih sulit mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan untuk pendidikan yang lebih tinggi terbatas. Semakin

tinggi pendidikan, maka semakin sempit lapangan pekerjaan, karena jenis pekerjaan untuk pendidikan lebih tinggi, lebih spesifik dan lebih membutuhkan keahlian tertentu, sehingga tidak membutuhkan pekerja dalam jumlah besar. Berbeda dengan jenis pekerjaan untuk penduduk yang berpendidikan rendah, yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan khusus.

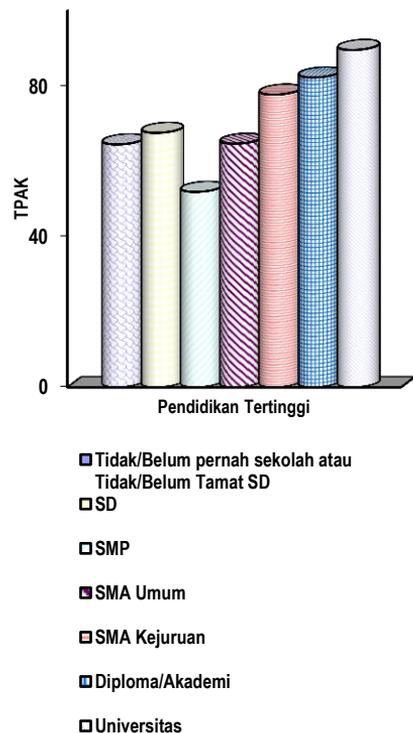
Tabel 4.2  
TPAK dan TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Tingkat Pendidikan	TPAK		TPT	
	2013*	2014	2013*	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/Belum pernah sekolah atau Tidak/Belum Tamat SD	61,45	64,43	3,66	3,27
SD	64,40	67,50	4,01	4,45
SMP	50,70	51,84	6,13	6,19
SMA Umum	62,73	64,62	11,22	9,22
SMA Kejuruan	73,99	77,63	13,02	11,15
Diploma/Akademi	81,85	82,19	6,98	5,79
Universitas	86,70	89,48	8,30	8,46
Total	62,92	65,19	7,02	6,50

Keterangan: \* Angka Backcasting dengan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Sumber: Sakernas 2013-2014

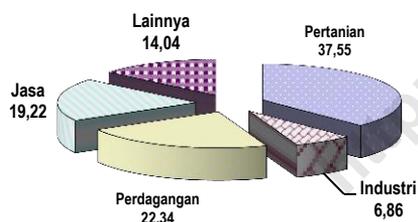
Gambar 4.2 TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014



## Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Persentase pekerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yaitu sebesar 37,55 persen tahun 2014 dan 39,68 persen pada tahun 2013. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, daerah perdesaan paling besar menyumbang di sektor pertanian yaitu sebesar 53,91 persen tahun 2013 dan 51,00 persen tahun 2014.

Gambar 4.3 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat Tahun 2014



Tabel 4.3  
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Lapangan Pekerjaan Utama	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2013*	2014	2013*	2014	2013*	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	16,07	15,15	53,91	51,00	39,68	37,55
Industri	8,17	8,49	5,36	5,87	6,42	6,86
Perdagangan	31,91	31,98	17,53	16,55	22,94	22,34
Jasa	25,51	25,21	12,18	15,62	17,19	19,22
Lainnya	18,34	19,17	11,02	10,96	13,77	14,03

Keterangan: \* Angka *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Sumber: Sakernas 2013-2014

Catatan:

- Pertanian termasuk kehutanan, perburuan, peternakan dan perikanan
- Perdagangan meliputi perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel
- Jasa meliputi jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

- Lainnya termasuk pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.

Selama tahun 2013-2014 lapangan pekerjaan utama di daerah perkotaan adalah bidang perdagangan, yaitu berturut-turut sebesar 31,91 persen dan 31,98 persen. Disamping perdagangan, sektor jasa juga mendominasi daerah perkotaan. Pada tahun 2013 nilainya sedikit turun dari 25,51 persen menjadi 25,21 persen pada tahun 2014.

Tabel 4.4  
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2013*	2014	2013*	2014	2013*	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	20,24	21,07	24,77	25,86	23,07	24,06
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja tidak dibayar	13,14	12,68	20,44	20,51	17,69	17,57
Bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,02	5,88	4,45	3,48	4,66	4,38
Buruh/karyawan/pegawai	45,57	45,44	22,01	22,51	30,87	31,11
Pekerja bebas di pertanian	2,14	1,92	7,36	7,13	5,40	5,17
Pekerja bebas di non pertanian	4,51	4,66	4,09	4,82	4,25	4,76
Pekerja keluarga	9,38	8,35	16,89	15,69	14,07	12,94

Keterangan: \* Angka *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Sumber: Sakernas 2013 – 2014

---

Bila dilihat menurut status pekerjaan, mayoritas pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 31,11 persen di tahun 2014. Di daerah perkotaan pekerja sebagai buruh/karyawan pada tahun 2013 dan 2014 berkisar 45 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan pekerja sebagai buruh/karyawan relatif sama di kisaran 22 persen baik pada tahun 2013 maupun tahun 2014. Di daerah perdesaan dominasi status pekerjaan masih pada status berusaha sendiri pada selang waktu tahun 2013-2014.

### **Jumlah Jam Kerja**

*Setengah Pengangguran adalah penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal (35 jam seminggu)*

Fokus ketenagakerjaan tidak hanya pada besarnya angka pengangguran tetapi juga pada produktivitas tenaga kerja melalui jumlah jam kerja. Asumsi yang berlaku adalah semakin banyak jam kerja maka pekerja akan semakin produktif. Konsep jumlah jam kerja yang digunakan adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan (tidak termasuk jam istirahat dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bila pekerja bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) disebut Setengah Pengangguran.

Pada Tabel 4.5 terlihat penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal adalah 54,28 persen tahun 2013 dan 40,10 persen pada tahun 2014. Sedangkan penduduk yang bekerja di atas 60 jam adalah 8,50 persen tahun 2013. Angka ini naik menjadi 10,34 persen pada tahun 2014.

Tabel 4.5  
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

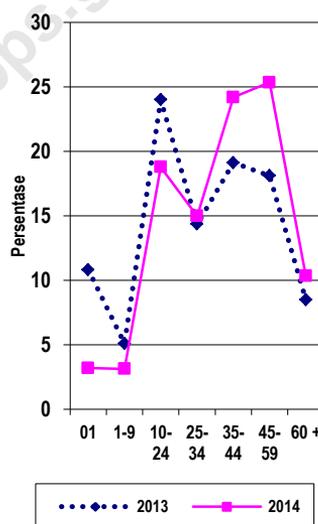
Kelompok Jam Kerja	2013*	2014
(1)	(2)	(3)
0 <sup>1</sup>	10,82	3,20
1 – 9	5,09	3,13
10 – 24	24,01	18,79
25 – 34	14,36	14,99
35 – 44	19,12	24,20
45 – 59	18,11	25,35
60 +	8,50	10,34

Keterangan: \* Angka *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

0<sup>1</sup> sementara tidak bekerja

Sumber: Sakernas 2013-2014

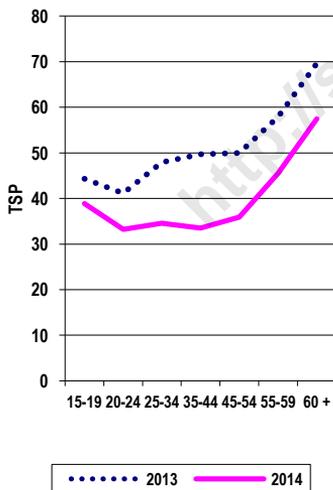
Gambar 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Dengan melihat jam kerja dapat diperoleh Tingkat Setengah Pengangguran (TSP). TSP dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya TSP mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan tenaga kerja

yang ada. Dari Tabel 4.6, TSP Sumatera Barat pada tahun 2013 adalah 36,97 persen dan tahun 2014 naik menjadi 40,32 persen. Bila dilihat menurut kelompok umur, pada tahun 2013 TSP tertinggi berada pada kelompok umur 60 tahun ke atas (57,63 %) dan kelompok umur 55-59 tahun (45,62 %). Untuk tahun 2014, TSP tertinggi juga terdapat pada kelompok umur 60 tahun ke atas (55,81 %) dan kelompok umur 55-59 tahun (47,18 %)

Gambar 4.5 Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Tabel 4.6  
Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Kelompok Umur	2013*	2014
(1)	(2)	(3)
15 – 19	44,30	38,91
20 – 24	41,12	33,19
25 – 34	47,96	34,54
35 – 44	49,67	33,51
45 – 54	50,01	35,89
55 – 59	57,93	45,53
60 +	69,61	57,49
<b>Sumatera Barat</b>	<b>50,47</b>	<b>37,50</b>

Keterangan: \* Angka *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Sumber: Sakernas 2013-2014

---

<http://sumbar.bps.go.id>

---

## 5 **TARAF DAN POLA KONSUMSI**

Pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan pangan, budaya, tingkat pendapatan maupun lingkungan tempat tinggal. Ada pendapat yang mengelompokkan faktor yang menentukan konsumsi sebagai faktor ekonomi demografi dan non ekonomi. Pendapatan dan aset masuk dalam kelompok ekonomi yang akan menentukan daya beli masyarakat. Selanjutnya jenis kelamin umur dan struktur rumah tangga merupakan variable demografi yang dapat mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Kondisi sosial budaya menentukan pola konsumsi penduduk melalui kecenderungan (selera) penduduk dalam kebutuhan makan maupun non makanan. Pengaruh tersebut melalui tata nilai yang hidup dalam budaya setempat yang disebut sebagai faktor non ekonomi.

*Persentase pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi makanan akan menurun seiring dengan peningkatan (pendapatan).*

### **Pengeluaran Rumah Tangga**

Ernst Engel seorang statistisi dari Jerman mengatakan bahwa persentase pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi makanan akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Elastisitas

pendapatan terhadap permintaan makanan rendah (antara 0 dan 1) sebaliknya elastisitas untuk permintaan terhadap komoditas non makanan tinggi. Kecenderungan tersebut proporsi konsumsi makanan dan non makanan sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengilustrasikan kesejahteraan penduduk.

Tabel 5.1

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Tipe Daerah di Sumatera Barat Tahun 2013-2014 (Rupiah)

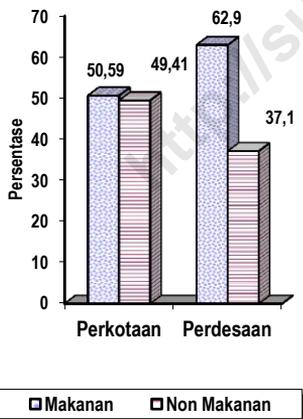
Jenis Pengeluaran		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)		(2)	(3)	(4)
2013	Makanan	489 325,54	399 203,81	434 291,57
	Non Makanan	489 159,32	235 328,73	334 154,48
	Total	978 484,86	634 532,53	768 446,05
2014	Makanan	509 516,78	420 212,71	455 098,09
	Non Makanan	497 563,57	247 883,86	345 417,72
	Total	1 007 080,35	668 096,57	800 515,81

Sumber: BPS Susenas 2013-2014

Tabel 5.1 menunjukkan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Sumatera Barat dalam sebulan menurut jenis pengeluarannya. Pada tahun 2014 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Barat dalam sebulan adalah Rp. 800.515,81, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai

Rp. 768.446,05. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita namun persentase pengeluaran makanan tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu tersebut. Pengeluaran makanan merupakan lebih kurang 57 persen dari total pengeluaran pada 2013-2014.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Menurut Komoditi Makanan dan Non Makanan dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014



Perbedaan yang cukup tajam dalam proporsi konsumsi makanan dan non makanan terjadi di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan proporsi pengeluaran makanan dan non makanan hampir berimbang yaitu mencapai sekitar 50 persen dari total pengeluaran. Sedangkan untuk daerah perdesaan proporsi pengeluaran makanan hampir 12 persen lebih tinggi daripada daerah perkotaan (sekitar 63 %). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa daerah perdesaan dengan tingkat pengeluaran lebih rendah masih memfokuskan pengeluarannya untuk pemenuhan kebutuhan makanan.

Tabel 5.2 menunjukkan struktur pengeluaran penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok komoditas non makanan. Secara umum struktur pengeluaran tidak banyak perubahan antara 2013 dan 2014. Pengeluaran rumah tangga untuk komoditas perumahan serta aneka barang dan jasa berkontribusi

lebih dari 78 persen total pengeluaran non makanan. Selanjutnya jika dilihat dari pertumbuhannya maka kelompok pakaian, alas kaki dan tutup kepala memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dari 2013 ke 2014 (sekitar 17,37 %). Komoditas yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah kelompok barang tahan lama dan kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri, berturut-turut turun 22,61 persen dan 11,72 persen

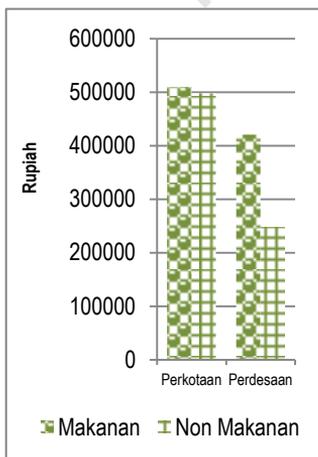
Tabel 5.2  
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan  
Menurut Kelompok Barang di Sumatera Barat  
Tahun 2013 dan 2014

Kelompok Barang	2013 (Rp)	2014 (Rp)	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan</b>	<b>434 291,57</b>	<b>455 098,09</b>	<b>4,79</b>
<b>Non makanan</b>	<b>334 154,48</b>	<b>345 417,72</b>	<b>3,39</b>
Perumahan & Fasilitas Rumah Tangga	125 831,69	129 224,32	2,70
Aneka Barang & Jasa	128 686,27	139 395,77	8,32
Pakaian Alas kaki & tutup kepala	26 455,73	31 050,42	17,37
Barang Tahan Lama	32 772,19	25 363,61	-22,61
Pajak Pungutan & Asuransi	9 054,32	10 360,59	14,43
Keperluan pesta & Upacara/ Kenduri	11 354,27	10 023,02	-11,72
<b>Jumlah</b>	<b>768 446,05</b>	<b>800 515,81</b>	<b>4,17</b>

Sumber: BPS Susenas 2013-2014

Rata-rata pengeluaran makanan sebulan penduduk Sumatera Barat adalah Rp. 455.098,09. Jika dibedakan menurut kelompok pengeluaran maka pengeluaran makanan juga meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran per kapita sebulan. Pada kelompok pendapatan kurang dari 150.000,00 rupiah perkapita per bulan sekitar 70 persen pengeluarannya digunakan untuk komoditas makanan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran lebih dari 1.000.000,00 rupiah proporsi untuk pengeluarannya makanannya lebih kecil yaitu sekitar 42 persen.

Gambar 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014



Tabel 5.3

Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 (Rupiah)

Golongan Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 150 000	.	107 783,95	107 783,95
150 000 – 199 999	.	141 989,56	141 989,56
200 000 – 299 999	183 167,57	194 989,55	192 324,06
300 000 – 499 999	266 945,43	300 505,94	292 642,20
500 000 – 749 999	388 220,10	407 794,38	400 692,32
750 000 – 999 999	508 588,45	536 330,76	524 480,25
≥ 1 000 000	746 034,58	716 929,33	735 411,08
<b>Rata-Rata Perkapita</b>	<b>509 516,78</b>	<b>420 212,71</b>	<b>455 098,09</b>

Sumber: BPS Susenas 2014

---

Tabel 5.3 menunjukkan pengeluaran perkapita pada kelompok makanan yang dibedakan menurut golongan pengeluaran dan tempat tinggal. Secara umum pengeluaran makanan penduduk perdesaan lebih tinggi daripada penduduk perkotaan. Hanya pada golongan pengeluaran di atas 1.000.000,00 rupiah, pengeluaran makanan penduduk perdesaan lebih kecil dari penduduk perkotaan.

Sedangkan pada Tabel 5.4 data disajikan untuk kelompok non makanan. Secara umum pengeluaran penduduk perkotaan lebih tinggi dari pada penduduk perdesaan kecuali pada golongan pengeluaran rendah, yaitu pada rentang golongan pengeluaran di bawah 150.000,00 rupiah hingga 199.999,00 rupiah.

Tabel 5.4.  
Rata-Rata Pengeluaran untuk Non Makanan  
Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran  
dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun  
2014

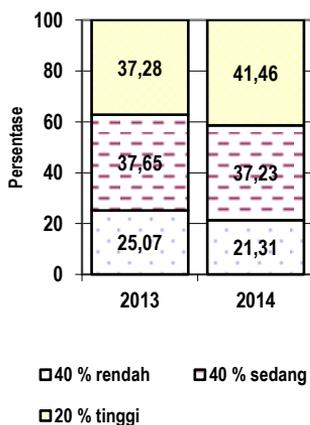
Golongan Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 150 000	.	40 371,85	40 371,85
150 000 – 199 999	.	39 471,23	39 471,23
200 000 – 299 999	86 757,84	74 321,40	77 125,44
300 000 – 499 999	153 609,18	110 339,17	120 477,99
500 000 – 749 999	228 586,23	200 023,91	210 387,07
750 000 – 999 999	355 770,04	325 654,97	338 519,04
≥ 1 000 000	984 427,36	712 809,47	885 286,06
<b>Rata-Rata Perkapita</b>	497 563,57	247 883,86	345 417,72

Sumber: BPS Susenas 2014

### Distribusi Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang sangat populer dan banyak digunakan adalah Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini dihitung berdasarkan Kurva *Lorenz*, kurva yang menghubungkan frekuensi kumulatif distribusi pendapatan atau pengeluaran dengan distribusi seragam (*uniform*) yang menggambarkan pemerataan. Nilai dari Indeks Gini mempunyai rentang dari 0 sampai 1. Jika terjadi pemerataan yang sempurna Indeks Gini akan bernilai 0.

Gambar 5.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Kemudian Bank Dunia juga membuat kriteria distribusi pendapatan untuk menggambarkan ketimpangan. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan (*proxy*) dari pendapatan.

Tabel 5.5  
Distribusi Pengeluaran Penduduk Perkapita dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Tahun	40% berpengeluaran rendah	40% berpengeluaran sedang	20% berpengeluaran tinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	25,07	37,65	37,28	0,338
2014	21,31	37,23	41,46	0,321

Sumber: Susenas 2013-2014

Tabel 5.5 menyajikan distribusi pengeluaran penduduk dan Indeks Gini di Sumatera Barat Tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2014, 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah menerima 21,31 persen

*Dari penghitungan Indeks Gini dan distribusi pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat pada tahun 2014 lebih kecil dibandingkan tahun 2013.*

---

dari seluruh pendapatan. Berdasarkan indikator ketimpangan Bank Dunia, angka tersebut masih dalam tingkat ketimpangan yang rendah karena kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

Membandingkan antara tahun 2013 dan 2014 terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran rendah mengalami penurunan yaitu dari 25,07 persen menjadi 21,31 persen. Diikuti untuk kelompok 40 persen berpengeluaran sedang juga mengalami penurunan yaitu dari 37,65 persen pada tahun 2013 menjadi 37,23 persen pada tahun 2014. Kenaikan persentase terjadi pada kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi yaitu 37,28 persen di tahun 2013 menjadi 41,46 persen pada tahun 2014. Dengan kenaikan persentase penduduk di kelompok 40 persen pengeluaran rendah dan penurunan persentase penduduk di kelompok 40 persen pengeluaran sedang, hal ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk tahun 2014 secara umum cenderung membaik dibanding tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya Indeks Gini dari tahun 2013 sebesar 0,338 menjadi 0,321 di tahun 2014.

---

## Konsumsi Energi dan Protein

Data Susenas 2013-2014 untuk Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari mengalami kenaikan dalam periode tersebut. Kontribusi kalori menurut kelompok komoditas menunjukkan adanya perubahan pola pangan penduduk Sumatera Barat. Kelompok padi-padian tetap menjadi penyumbang kalori utama dan mengalami kenaikan jumlah kalori pada tahun 2014. Di samping itu kelompok komoditi yang juga mengalami kenaikan adalah kelompok ikan, daging, kacang-kacangan, buah-buahan, dan minyak dan lemak. Sementara kelompok komoditi yang mengalami penurunan jumlah kalori adalah kelompok umbi-umbian, telur dan susu, bahan minuman dan kelompok makanan dan minuman jadi. Ada pula yang kelompok komoditi yang jumlah kalorinya tetap tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seperti jumlah kalori dari kelompok komoditi sayur-sayuran, buah-buahan dan konsumsi lainnya.

Seiring dengan kenaikan rata-rata konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga mengalami kenaikan. Padi-padian, ikan, makanan dan minuman jadi, telur dan susu serta daging merupakan kelompok komoditi yang memberikan kontribusi besar dalam konsumsi protein. Belum banyak perubahan

*Dari tahun 2013-2014 konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Sumatera Barat mengalami kenaikan. Diikuti oleh kenaikan konsumsi protein.*

---

pola pangan yang terjadi dalam kurun waktu 2013-2014. Ini terindikasi dari belum berubahnya jumlah konsumsi protein kelompok komoditi. Kelompok padi-padian mengalami kenaikan kontribusi protein dibandingkan tahun lalu. Demikian pula, daging, ikan, telur dan susu yang juga masih merupakan komoditi dengan kontribusi cukup tinggi dibandingkan komoditi makanan lainnya dalam pembentukan konsumsi protein. Pada tahun 2014, kelompok komoditi yang mengalami penurunan konsumsi protein hanya pada kelompok umbi-umbian dan telur dan susu.

Tabel 5.6  
 Jumlah Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein Per  
 Jenis Komoditi di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Kelompok Komoditi	Jumlah Kalori (kkal/kapita/hr)		Jumlah Protein (gram)	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	922,822	928,430	21,590	21,722
Umbi-umbian	26,834	23,600	0,431	0,409
Ikan	47,471	48,559	8,074	8,314
Daging	43,216	47,013	2,717	2,962
Telur dan susu	56,853	52,605	3,566	3,277
Sayur- sayuran	41,158	41,738	2,408	2,420
Kacang- kacangan	25,345	26,356	2,628	2,771
Buah-buahan	38,381	40,673	0,433	0,460
Minyak dan lemak	339,555	340,480	0,788	0,811
Bahan minuman	84,712	81,979	0,999	0,963
Bumbu- bumbuan	5,946	5,491	0,156	0,139
Konsumsi lainnya	28,102	28,857	0,522	0,529
Makanan & minuman jadi	261,682	257,874	7,362	7,214
Jumlah	1 922,076	1 923,657	51,673	51,992

Sumber: Susenas 2013-2014

---

## **6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN**

Berdasarkan UU no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan pemukiman.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan konsep rumah sehat. Rumah sehat diartikan secara luas karena konsep sehat itu sendiri mencakup suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan). Departemen Kesehatan mensyaratkan ada empat kondisi untuk dipenuhi sehingga rumah dapat dikategorikan sebagai sehat, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar

---

anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-masing penghuni;

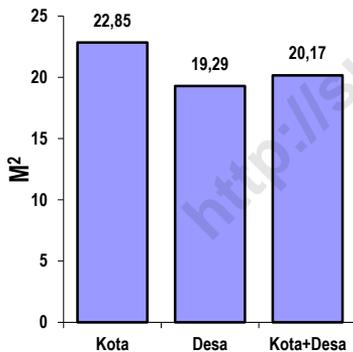
2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup;
3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah;
4. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu;

*Depkes menyebutkan 4 syarat untuk rumah sehat yaitu memenuhi kebutuhan psikologis dan fisiologis serta mencegah penularan penyakit dan kecelakaan.*

Selanjutnya terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat yaitu komponen rumah tinggal, sanitasi dan perilaku penghuni. Komponen rumah

tinggal terdiri dari langit-langit, dinding, ventilasi/jendela, lantai, kepadatan, pencahayaan serta pemanfaatan pekarangan. Aspek sanitasi mencakup sumber air bersih, jamban, sarana pembuangan limbah dan sampah. Kemudian keberadaan jentik nyamuk, vektor tikus serta kebiasaan cuci tangan merupakan variabel yang digunakan untuk menilai perilaku sehat penghuni rumah.

Gambar 6.1 Rata-Rata Luas Lantai Perkapita (m<sup>2</sup>) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014



Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Tempat Tinggal Tahun 2014

Indikator Kualitas Rumah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah (%)	99,37	98,09	98,59
Atap beton, genteng, sirap, seng & asbes (%)	99,54	98,47	98,89
Dinding terluas tembok & kayu (%)	97,75	96,92	97,24
Rata-rata luas lantai perkapita (m <sup>2</sup> )	22,85	19,29	20,67

Sumber: BPS Susenas 2014

Berdasarkan data Susenas 2014 ditampilkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kualitas rumah. Tabel 6.1 menunjukkan bahwa mayoritas (98,59 %) rumah di Sumatera Barat memiliki

---

lantai bukan tanah yang berdampak positif pada higienis dan kesehatan penghuninya. Indikator lainnya seperti jenis dinding dan atap memiliki kondisi yang serupa. Luas lantai per kapita di Sumatera Barat adalah 20,67 meter persegi. Angka tersebut sudah lebih tinggi dari minimal luas lantai per kapita baik menurut Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Perumahan Rakyat. Masing-masing menyebutkan minimal lantai perkapita untuk hidup sehat adalah 8 meter persegi dan 7,2 meter persegi.

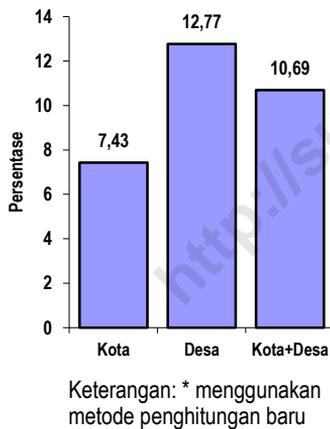
## Fasilitas Rumah Tinggal

Beberapa fasilitas perumahan berhubungan dengan prasyarat rumah sehat terutama aspek sanitasi. Sekitar 64,53 persen rumah tangga di Sumatera Barat menggunakan air minum bersih. Air bersih didefinisikan sebagai air minum yang bersumber dari air kemasan/isi ulang, ledeng serta pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi yang jarak ke tempat pembuangan limbah kurang 10 meter. Jika dilihat menurut tempat tinggal terlihat bahwa secara umum rumah tangga di perdesaan memiliki kualitas rumah yang lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi yang sejalan diperlihatkan pada indikator kepemilikan jamban sendiri dan jamban

*Fasilitas perumahan yang dilihat dari sumber air minum, jamban dan penerangan, menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki kondisi yang lebih baik daripada daerah perdesaan.*

sendiri dengan tangki septik. Bahkan untuk indikator yang terakhir (jamban sendiri dengan tangki septik) angka di perkotaan lebih dari dua kali lipat daripada perdesaan. Demikian juga sumber penerangan rumah tinggal untuk perkotaan memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi pada listik PLN maupun non PLN.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014 \*



Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2014

Fasilitas Perumahan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan, air isi ulang & ledeng	70,02	31,20	46,29
Air minum bersih	82,85	53,09	64,66
Jamban Sendiri	75,91	49,59	59,82
Jamban Sendiri dgn tangki septik	71,59	42,81	54,00
Sumber penerangan listrik	99,28	93,59	95,80

Sumber: BPS Susenas 2014

Selanjutnya sebanyak 10,69 persen rumah tangga di Sumatera Barat dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh. Jika dibedakan dari daerah perkotaan

dan perdesaan maka rumah tangga kumuh di perdesaan lebih besar yaitu 12,77 persen dibandingkan daerah perkotaan sebesar 7,43 persen. Rumah tangga kumuh itu sendiri didefinisikan dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu sumber air minum layak, sanitasi layak, *sufficient living area* serta *durability of housing*. Masing-masing aspek memiliki bobot berbeda dalam menentukan kriteria rumah tangga kumuh.

Tabel 6.3.  
 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Rumah  
 Tangga Kumuh dan Daerah Tempat Tinggal  
 Di Sumatera Barat Tahun 2014

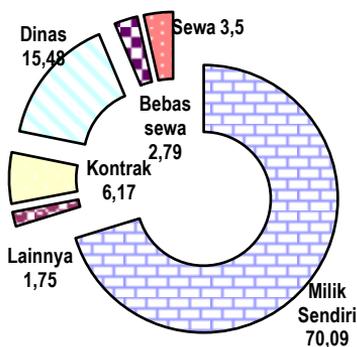
Indikator Rumah Tangga Kumuh	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air minum tidak layak *	19,97	48,48	37,40
Sanitasi tidak layak	35,59	71,70	57,66
<i>Insufficient of living</i>	12,48	13,81	13,29
<i>Durability of housing</i>	0,24	0,51	0,41

Keterangan: \* menggunakan metode penghitungan baru  
 Sumber: BPS Susenas 2014

Pada indikator-indikator rumah kumuh daerah perkotaan memiliki kondisi yang lebih baik daripada

daerah perdesaan. Di daerah perdesaan 71,70 persen rumah memiliki sanitasi tidak layak. Aspek ini dinilai dari pemakaian jamban sendiri atau bersama, kloset leher angsa dan tangki septik sebagai pembuangan akhir. Rumah memenuhi kriteria *sufficient of living* jika luas hunian perkapita kurang 7,2 meter persegi. Dari tabel 6.3, pada tahun 2014 masih terdapat 12,48 persen rumah tangga daerah perkotaan dan 13,81 persen rumah tangga daerah perdesaan di Sumatera Barat yang tidak memenuhi kriteria *sufficient of living*. Kemudian untuk *durability of housing* mempertimbangkan tiga variabel yaitu jenis atap jenis dinding serta jenis lantai. Rumah tangga dikatakan kumuh pada aspek *durability of housing* jika dua dari tiga variabel yang dinilai memenuhi kriteria kumuh. Di Sumatera Barat hanya 0,41 persen rumah tangga yang termasuk sebagai rumah tangga kumuh pada aspek ini berarti sebagian besar rumah tangga di Sumatera Barat memiliki kondisi tidak kumuh.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Berdasarkan Status Kepemilikannya di Sumatera Barat Tahun 2014



### Status Kepemilikan Rumah

Secara umum hampir 70 persen rumah tinggal adalah milik sendiri yang didefinisikan sebagai milik dari salah satu anggota rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Rumah dengan status bebas sewa juga cukup

besar proporsinya baik untuk perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya jika dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan sekitar 40,14 persen rumah di perkotaan berstatus bukan milik sendiri. Angka tersebut lebih besar dari daerah perdesaan (23,45 %). Rumah dengan status kontrak dan sewa juga cukup besar. Seperlima (20,59 %) rumah di perkotaan berstatus kontrak atau sewa.

Tabel 6.4.  
 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2014

Status Kepemilikan Rumah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	59,67	75,37	69,27
Kontrak	12,20	2,07	6,01
Sewa	7,86	0,95	3,63
Bebas sewa	17,64	19,77	18,94
Dinas	2,41	1,71	1,98
Lainnya	0,22	0,13	0,16

Sumber: BPS Susenas 2014

---

## 7 KEMISKINAN

*Data kemiskinan digunakan untuk bahan perencanaan maupun evaluasi program pembangunan (pengentasan kemiskinan).*

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sehingga mengatasi masalah kemiskinan juga merupakan salah satu pusat perhatian sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

### Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Banyak konsep dan pendekatan yang digunakan oleh berbagai ahli maupun institusi untuk menggambarkan kemiskinan. BPS sebagai salah satu institusi penyedia data termasuk data kemiskinan menggunakan konsep kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,68 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin menurut wilayah perkotaan tahun 2013-2014 mengalami penurunan sedangkan wilayah perdesaan mengalami kenaikan.

Tabel 7.1.  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tempat Tinggal Di Sumatera Barat Tahun 2013-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013*	120 604	290 518	411 121	6,16	9,39	8,14
2014	108 076	271 120	379 196	5,43	8,68	7,41

Keterangan: \* Angka *Backcasting*

Sumber : Susenas 2013-2014 (kondisi Maret)

Dari Maret 2013 ke Maret 2014 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 12,5 ribu jiwa, atau turun sebesar 10,39 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin juga diikuti di daerah

---

perdesaan yaitu 19,4 ribu jiwa atau turun sebesar 6,68 persen pada periode yang sama. Perubahan tersebut mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 411,121 ribu jiwa menjadi 379,196 ribu jiwa dari Maret 2013 ke Maret 2014.

### **Kedalaman dan Keparahan Penduduk Miskin**

*P1 merupakan indeks kedalaman kemiskinan dan P2 adalah indeks keparahan kemiskinan.*

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan (GK). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan.

Dari Tabel 7.2 terlihat bahwa P1 untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari Maret 2013 ke Maret 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-

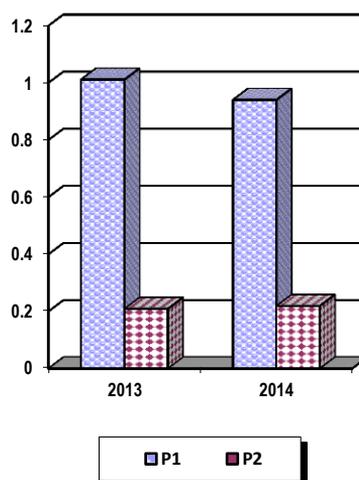
rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Masih dari Tabel 7.2 terlihat bahwa secara umum ketimpangan pengeluaran penduduk miskin mengalami kenaikan, yang diindikasikan dengan naiknya nilai P2 dari 0,209 pada tahun 2013 menjadi 0,219 pada tahun 2014.

Tabel 7.2  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2013-2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>P1</b>			
Maret 2013	0,999	1,019	1,011
Maret 2014	0,654	1,122	0,940
<b>P2</b>			
Maret 2013	0,238	0,191	0,209
Maret 2014	0,125	0,278	0,219

Sumber : Susenas 2013-2014 (kondisi Maret)

Gambar 7.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



---

## Kemiskinan Multidimensi

*MPI menggunakan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan living standard dalam penghitungannya*

Kemiskinan merupakan multidimensi konsep, dimana kemiskinan itu tidak bisa digambarkan dari aspek ekonomi (*income*) saja. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud antara lainnya mencakup: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

UNDP juga mulai beralih untuk menggunakan konsep kemiskinan multidimensi. Hal tersebut tercermin dalam *Human Development Report* tahun 2010, di mana UNDP menampilkan *Multidimensional Poverty Index* (MPI) sebagai salah satu indikator untuk menilai pembangunan manusia. Ada tiga dimensi yang dipertimbangkan dalam menilai MPI yaitu kesehatan, pendidikan dan *living standard*. Melihat dimensi tersebut dapat dikatakan bahwa penentuan MPI akan

---

sejalan dengan penentuan HDI (*Human Development Index*). Perbedaan mendasar ada pada metode penghitungannya.

Dari tiga dimensi yang dipertimbangan dalam penghitungan MPI ada sepuluh (10) indikator yang digunakan untuk menggambarkan tiga dimensi tersebut. Kesepuluh indikator tersebut adalah status gizi, kematian anak, partisipasi sekolah anak, lama sekolah, bahan bakar memasak, jenis lantai, sanitasi, sumber air minum, sumber penerangan dan kepemilikan asset. Masing-masing indikator mempunyai bobot yang berbeda. Unit analisis yang digunakan untuk penentuan MPI adalah rumah tangga. Rumah tangga dikatakan masuk dalam kategori miskin dalam konsep multidimensi jika memiliki skor melebihi batas yang ditentukan.

Konsep multidimensi kemiskinan juga sejalan dengan kemiskinan berdasarkan pendapatan (pengeluaran). Menurut data Susenas 2014 untuk Provinsi Sumatera Barat, rumah tangga dengan pengeluaran di 10 persen terbawah (desil 1) memiliki kondisi yang paling buruk pada beberapa variabel perumahan yang mengilustrasikan rendahnya standar hidup.

Tabel 7.3.  
 Persentase Rumah Tangga Menurut Desil Pengeluaran  
 Perkapita dan Variabel Perumahan Tahun 2014

Desil Pengelu- aran Per- kapita	Sumber Pene- rangan	Sanitasi	Air Minum	Jenis Lantai	Bahan Bakar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	14,36	59,22	58,93	3,43	84,95
2	5,26	51,08	46,41	1,81	73,34
3	4,74	40,24	38,10	1,61	65,78
4	3,95	35,76	38,63	0,79	60,95
5	3,72	32,93	36,08	2,70	57,46
6	2,85	30,25	35,24	1,17	49,30
7	2,42	23,44	27,61	0,91	42,93
8	2,57	17,57	26,58	0,88	33,33
9	1,03	10,84	22,02	0,54	22,52
10	1,09	4,55	10,86	0,30	16,22

Sumber: Susenas 2014

Pada sumber penerangan 14,36 persen rumah tangga dengan pengeluaran rendah belum menggunakan listrik PLN maupun Non PLN. Sanitasi di rumah tangga dengan pengeluaran terendah juga cukup memprihatinkan karena lebih dari setengah (59,22%) rumah tangga tersebut masih menggunakan jamban umum atau tidak ada jamban sama sekali. Selanjutnya pada sumber air minum juga menunjukkan kondisi yang serupa. Sekitar 58,93 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum tidak bersih atau tidak

layak. Dalam hal ini air bersih atau layak didefinisikan sebagai air kemasan, ledeng, air hujan serta air pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi dengan jarak lebih dari 10 m ke tempat pembuangan kotoran. Jenis lantai (tanah dan bambu) serta bahan bakar (kayu, arang dan lainnya) memperlihatkan kondisi yang serupa.

Tabel 7.4.  
 Persentase Rumah Tangga Menurut Desil  
 Pengeluaran Perkapita dan Aset di Sumatera Barat  
 Tahun 2014

Desil Pengelu- aran Per- kapita	Sepeda	Sepeda Motor	Lemari Es/ Kulkas	Tabung Gas 12 Kg/ lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	16,44	57,66	15,76	1,53
2	16,72	66,63	25,50	4,21
3	19,39	71,77	33,84	5,19
4	22,59	74,83	34,88	5,83
5	20,63	76,76	41,07	11,04
6	22,66	77,62	46,60	15,34
7	22,98	80,17	50,74	18,20
8	24,89	80,40	58,84	25,90
9	26,32	81,36	69,62	38,36
10	32,46	82,67	73,45	54,18

Sumber: Susenas 2014

Selain variabel perumahan, aset juga merupakan variabel penting dalam menggambarkan standar hidup.

---

Beberapa kepemilikan aset yang ditanyakan dalam Susenas 2014 adalah sepeda, sepeda motor, lemari es dan tabung gas 12 kg/lebih. Dari keempat asset tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah juga memiliki persentase terendah dalam kepemilikan asset tersebut. Kecuali untuk sepeda motor. Kepemilikan sepeda motor relatif dimiliki sebagian besar rumah tangga dengan tidak melihat golongan pengeluarannya. Melihat data tersebut layak untuk dipertimbangkan bahwa pengukuran kemiskinan sudah seharusnya mulai mempertimbangkan aspek yang lebih luas bukan hanya mempertimbangkan pendapatan (pengeluaran). Selanjutnya penting pula diperhatikan kepemilikan asset bagi penduduk miskin sebagai salah satu strategi penurunan kemiskinan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Michael Sherraden (2000) dalam essay nya *Building Asset to Fight Poverty* yang secara intensif melakukan riset pada pemberantasan kemiskinan berdasarkan asset.

### **Program Pengentasan Kemiskinan**

Banyak program pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan penduduk. Misalnya pelayanan kesehatan gratis maupun beras miskin (raskin). Bila dilihat dari tabel 7.5, untuk rumah

---

tangga yang pernah menerima/membeli raskin ternyata baik rumah tangga dengan golongan pengeluaran rendah hingga ke golongan pengeluaran tinggi, semuanya pernah menerima atau membeli raskin pada tahun 2014. Ini mengindikasikan adanya penyimpangan (tidak tepat sasaran) program pemerintah.

Sementara itu dari sisi kesehatan, pemerintah juga telah mencanangkan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan dari jaminan kesehatan pemerintah tapi juga jaminan kesehatan yang bersifat mandiri atas inisiatif sendiri atau dari biaya tempat kerja swasta.

Adapun secara definisi yang dimaksud dengan Jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di dalam Susenas 2014, ditanyakan mengenai jenis jaminan kesehatan yang dimiliki anggota rumah tangga tersebut.

Masih dari tabel 7.5, terlihat bahwa secara rata-rata di setiap golongan pengeluaran rumah tangga, terdapat hampir 50 persen rupa yang anggota rumah tangganya memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan.

Tabel 7.5.  
Persentase Rumah Tangga Menurut Desil Pengeluaran Perkapita dan Akses Pada Pelayanan Kesehatan Gratis serta Raskin di Sumatera Barat Tahun 2014

Desil Pengeluaran per Kapita	Apakah ada anggota rumah tangga yang memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan dalam setahun terakhir	Apakah rumah tangga ini pernah menerima/membeli beras miskin (raskin)?
(1)	(2)	(3)
1	55,01	63,95
2	53,14	57,95
3	48,68	49,46
4	50,42	49,94
5	45,08	42,45
6	43,48	34,90
7	40,36	29,29
8	44,29	25,63
9	51,20	15,65
10	60,47	6,12

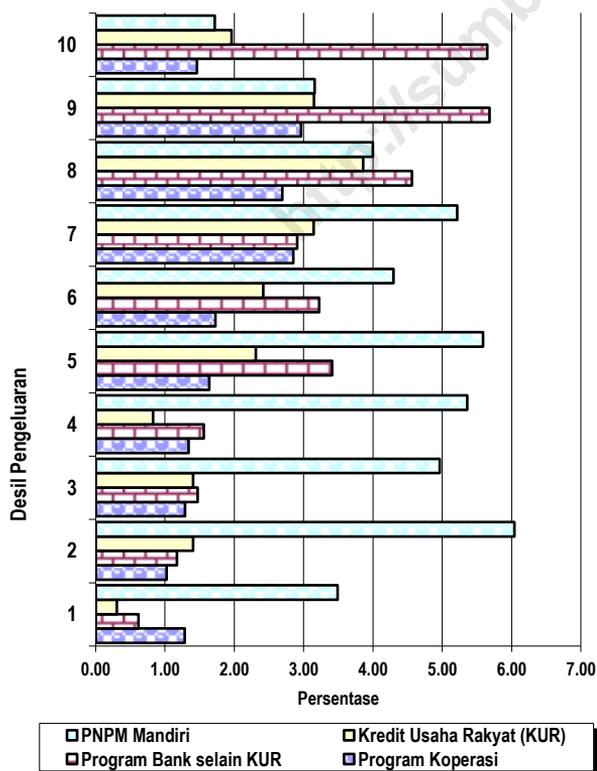
*Rumah tangga dengan pengeluaran perkapita paling rendah masih memiliki aksesibilitas yang rendah pada kredit usaha.*

Sumber: Susenas 2014

Program kredit usaha juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Berbagai macam kredit usaha diselenggarakan seperti PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bank

selain KUR, program koperasi, maupun kredit usaha yang disediakan perorangan. Data Susenas 2014 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di 10 persen pengeluaran terbawah yang mendapatkan kredit masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Grafik di bawah menunjukkan bahwa rumah tangga di desil pengeluaran paling bawah memperoleh akses yang tidak besar pada kredit usaha.

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Kredit Tahun 2014



---

## 8 SOSIAL LAINNYA

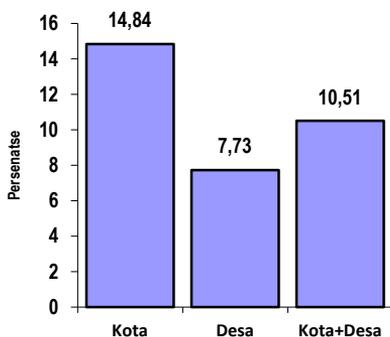
Ketika kesejahteraan diterjemahkan dalam arti luas maka kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup aspek kemampuan dibidang ekonomi. Menurut Amartya Sen (1985) dalam artikel *Well-Being, Agency dan Freedom* kebebasan (*freedom*) merupakan aspek penting yang harus dipertimbangan dalam membahas kesejahteraan (*well being*). Kebebasan diterjemahkan sebagai kapasitas untuk berpartisipasi dan kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri.

### Perjalanan “Wisata”

Salah satu aspek yang dapat menggambarkan kebebasan dalam kerangka kesejahteraan adalah akses terhadap perjalanan. Data Susenas mengumpulkan data perjalanan ‘wisata” yang diartikan lebih luas yaitu sebagai perjalanan yang menempuh jarak lebih dari 100 kilometer pulang pergi atau mengunjungi objek wisata komersial atau menginap diusaha jasa akomodasi komersial. Referensi waktu ditentukan dalam 3 bulan terakhir kalender.

Gambar 8.1 menunjukkan bahwa sekitar 10,51 persen penduduk Sumatera Barat melakukan

Gambar 8.1. Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Melakukan Perjalanan Tahun 2014



---

perjalanan dalam kurun waktu tersebut. Jika dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan maka persentase penduduk perkotaan yang melakukan perjalanan jauh lebih besar. Kemudian jika diperhatikan tujuan untuk melakukan perjalanan maka sebahagian besar bertujuan untuk mengunjungi teman atau keluarga. Berlibur atau rekreasi juga merupakan tujuan perjalanan yang cukup populer. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka persentase penduduk dirinci menurut tujuan perjalanan yang dilakukan tidak banyak berbeda di antara penduduk perkotaan dengan penduduk perdesaan. Yang perlu dicermati, penduduk perdesaan masih banyak melakukan perjalanan dengan tujuan kesehatan, ini mengindikasikan masih jauhnya jarak tempat tinggal dengan tempat fasilitas kesehatan atau juga mengindikasikan bahwa penduduk perdesaan bila bepergian dengan tujuan kesehatan harus menginap di tempat menginap usaha jasa akomodasi komersial.

Tabel 8.1.  
 Persentase Penduduk Sumatera Barat yang  
 Melakukan Perjalanan dalam Kurun Waktu  
 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuannya Tahun 2014

Tujuan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berlibur/rekreasi	32,53	29,01	30,95
Profesi/bisnis/misi/ pertemuan/kongres	7,59	8,61	8,05
Pendidikan/Pelatihan	1,98	2,90	2,39
Kesehatan	1,52	5,28	3,20
Berziarah/keagamaan	2,19	2,87	2,50
Mengunjungi teman/keluarga	51,53	46,03	49,06
Olahraga/Kesenian	0,10	0,10	0,10
Lainnya	2,56	5,20	3,74

Sumber: Susenas 2014

### Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Kebebasan untuk berpartisipasi dan memiliki kapasitas mencapai kesejahteraan dapat diperoleh jika akses terhadap informasi terbuka. Salah satu data yang mengilustrasikan keterbukaan terhadap informasi adalah kepemilikan alat komunikasi dan akses internet.

Tabel 8.2.  
 Persentase Rumah Tangga di Sumatera Barat Menurut  
 Akses Terhadap Alat Komunikasi dan Informasi  
 Tahun 2014

Alat Komunikasi & Informasi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Rumah	9,29	2,37	5,06
Handphone	96,17	84,75	89,19
Desktop	10,49	1,98	5,29
Laptop	29,73	8,34	16,65

Sumber: Susenas 2014

Data Susenas 2014 menunjukkan bahwa handphone merupakan alat komunikasi yang populer di Sumatera Barat, karena hampir 90 persen penduduk menguasai alat komunikasi tersebut. Kondisi tersebut tidak sama pada telepon rumah, desktop maupun laptop. Kurang dari 16 persen penduduk Sumatera Barat menguasai alat tersebut. Bahkan untuk daerah pedesaan persentasenya sangat kecil (8,34 %) untuk penguasaan laptop. Kondisi tersebut menggambarkan jika akses untuk komunikasi dan informasi di daerah pedesaan harus lebih ditingkatkan.

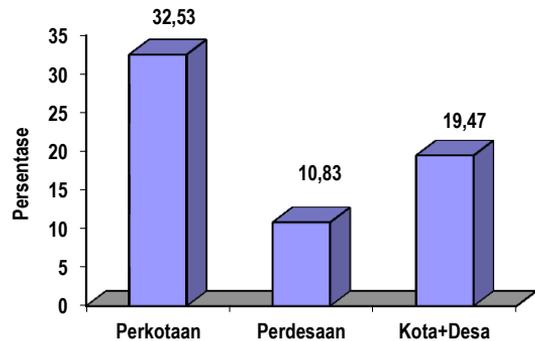
Keterbukaan pada informasi juga dapat dilihat dari persentase penduduk yang melakukan akses pada internet. Data Susenas 2014 menunjukkan bahwa

*Penduduk perdesaan memiliki akses internet jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan.*

19,47 persen penduduk Sumatera Barat mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sebelum survei. Persentase tersebut akan jauh berbeda jika dilihat menurut perkotaan dan perdesaan. Data tersebut kembali menunjukkan bahwa akses informasi di perdesaan (10,83 %) masih tertinggal dibandingkan daerah perkotaan (32,53 %).

Gambar 8.2.

Persentase Penduduk Sumatera Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Tipe Tempat Tinggal Tahun 2014



Selanjutnya jika dilihat menurut alat/lokasi melakukan akses internet maka warnet dan handphone merupakan alat atau lokasi yang paling populer.

Tabel 8.3

Persentase Pengguna Internet Berumur 15 Tahun Ke Atas dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tempat Akses di Sumatera Barat Tahun 2014

Lokasi Akses Internet	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah	24,94	9,71	19,84
Warnet	29,67	41,96	33,78
Kantor	20,67	7,92	16,41
Sekolah	11,29	11,35	11,31
Handphone	63,59	64,93	64,04
Lainnya	19,03	7,53	15,18

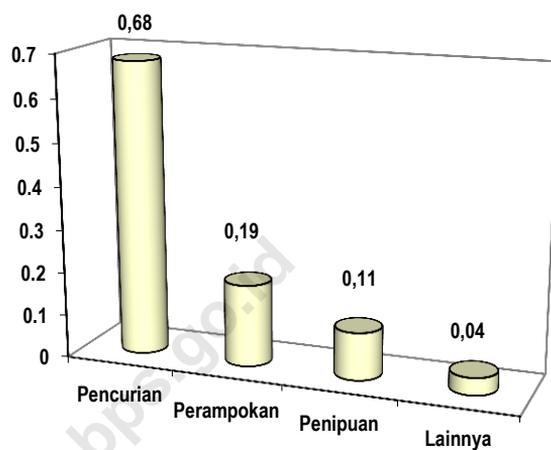
Sumber: Susenas 2014

Catatan: Seorang dapat melakukan akses dilebih dari satu tempat

## Tindak Kejahatan

Aspek lainnya dari kesejahteraan adalah kriminalitas. Bebas dari tindak kejahatan akan mendukung pencapaian kesejahteraan itu sendiri. Pada tahun 2014, sekitar 1,02 persen penduduk di Sumatera Barat mengalami tindak kejahatan. Pencurian dan perampokan merupakan tindak kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk Sumatera Barat selama tahun 2014.

Gambar 8.3.  
Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Mengalami  
Tindak Kriminalitas Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2014









<http://sumbar.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, 25135  
Telp. 442158, 442159  
E-mail : [sumbar@bps.go.id](mailto:sumbar@bps.go.id)  
Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

